

## **Gladys Nadya, S.Sos.**

Email: [gladys@ijrs.or.id](mailto:gladys@ijrs.or.id)

LinkedIn: [Gladys Nadya](#)



### **Profil Singkat**

Gladys Nadya merupakan lulusan program sarjana Kriminologi, Universitas Indonesia. Selain menjabat sebagai Peneliti di IJRS, Gladys juga aktif di Kementerian PPN/Bappenas sebagai Konsultan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sejak 2023.

Memiliki ketertarikan pada isu Gender, Kelompok Rentan, dan Akses terhadap Keadilan. Ia kerap menjadi narasumber maupun moderator di berbagai acara yang melibatkan pemangku kepentingan, salah satunya pada *Talk Show Open Government Week 2023* bertajuk “Keterbukaan Pemerintah yang Bermakna bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendorong Akses terhadap Keadilan di Indonesia”.

Saat ini, Gladys terlibat di beberapa program IJRS baik sebagai peneliti, Project officer, sampai Program manager, di antaranya: Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait Kebijakan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (mitra: AIPJ2 Tahun 2023 - 2024); Program Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Desa (Legal Empowerment Funds Tahun 2023 - 2025); dan Kampanye dan Publikasi Bersama Portal Data (AIPJ2 Tahun 2022 - 2024).

### **Jabatan Saat Ini**

Peneliti

### **Pendidikan**

- S1 Kriminologi di Universitas Indonesia (lulus 2021)

## **Pengalaman Kerja**

1. Konsultan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Kementerian PPN/Bappenas (2023 - sekarang)
2. Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (2021 - sekarang)
3. Asisten Peneliti Proyek Penelitian Dosen di Forschen U. Indonesia (FUI) Universitas Indonesia (2021)
4. Magang Advokasi dan Asisten Peneliti di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) (2020 - 2021)

## **Program IJRS yang Pernah Dijalankan**

1. Menjadi Peneliti dalam Program Kajian Perubahan Anggaran Bantuan Hukum, dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) Tahun 2023
2. Menjadi Peneliti dalam Program Asistensi Penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2022 - 2023
3. Menjadi Peneliti dalam Program Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022, dengan dukungan the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Tahun 2022
4. Menjadi Peneliti dalam Program Monitoring dan Evaluasi SDGs 16.3 di Indonesia, dengan dukungan ALG Network Tahun 2022
5. Menjadi Peneliti dalam Program Penyusunan Indeks Akses Keadilan (A2J) dan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun Pengukuran 2021, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2021 - 2022
6. Menjadi Peneliti dalam Program Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (2021 - 2022)
7. Menjadi Peneliti dalam Program Penelitian Asesmen Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2021 - 2022

## **Program IJRS yang Sedang Dijalankan**

1. Menjadi Peneliti di Program Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun Pengukuran 2022, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2023
2. Menjadi Project Officer di Program Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Desa, dengan dukungan Legal Empowerment Funds (LEF) Tahun 2023 - 2025
3. Menjadi Project Manager di program Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait Kebijakan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2023 - 2024
4. Menjadi Project Manager di Program Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum, dengan dukungan The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Tahun 2023
5. Menjadi Project Manager di Program Penyusunan Tools Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 5

Tahun 2019 terkait Kebijakan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2022 - 2023

6. Menjadi Peneliti di Program Kampanye dan Publikasi Bersama Portal Data, dengan dukungan AIPJ2 Tahun 2022 - 2024
7. Menjadi Peneliti Pengolah Data di Program Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pedoman Mengadili Perkara Narkotika (2022 - 2023)

## **Hasil Publikasi**

### **Buku**

1. \_\_\_\_\_. (2023). Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2021. Jakarta: UI Publishing
2. \_\_\_\_\_. (2023). Indeks Akses Terhadap Keadilan (A2J) Tahun 2021. Jakarta: UI Publishing
3. \_\_\_\_\_. (2023). Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: IJRS
4. \_\_\_\_\_. (2022). Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022. Jakarta: IJRS
5. \_\_\_\_\_. (2022). Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS
6. \_\_\_\_\_. (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: IJRS
7. \_\_\_\_\_. (2022). Booklet Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS

### **Tulisan di Media**

1. Ashila, Bestha Inatsan dan Arianto, Gladys Nadya. (2021). Hambatan Orang dengan HIV/AIDS Saat Mengalami Masalah Legal Pentingnya Peran Pendamping Hukum dan Non Hukum  
<https://theconversation.com/hambatan-orang-dengan-hiv-aids-saat-mengalami-masalah-l-egal-pentingnya-peran-pendamping-hukum-dan-non-hukum-172865>

### **Pencapaian**

1. Menjadi Narasumber dalam acara Talkshow Open Government Week 2023 bertajuk "Keterbukaan Pemerintah yang Bermakna bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendorong Akses terhadap Keadilan di Indonesia"
2. Menjadi Narasumber dalam acara Peluncuran Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021
3. Menjadi Moderator dalam acara Diseminasi Hasil Riset Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh IJRS dan Rutgers Indonesia
4. Menjadi Narasumber dalam acara Workshop Tools Joint Monitoring Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017: Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif bagi Perempuan di Semarang yang diselenggarakan oleh LBH Semarang